PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2017

SKRIPSI

Ditulis Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

OLEH :

AYU SEPTI HARI NASUTION
NIM. 15 402 00106

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2019

Scanned with CamScanner

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2017

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Oleh:

AYU SEPTI HARI NASUTION
NIM. 15 402 00106

Pembimbing I

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Pembimbing II

H. Ali Hardana, M.Si

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2019

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Ayu Septi Hari Nasution**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 23 Mei 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ayu Septi Hari Nasution** yang berjudul **"Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

H. Ali Hardana, M.Si

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Ayu Septi Hari Nasution
NIM	: 15 402 00106
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017**

Dengan ini menyatakan bahwa Saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 23 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Ayu Septi Hari Nasution

NIM. 15 402 00106

Scanned CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Ayu Septi Hari Nasution
NIM	: 15 402 00106
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017".** Dengan Hak Bebas *Royalti Non Eksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal, 23 Mei 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
9E37EAFF701723
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ayu Septi Hari Nasution
NIM. 15 402 00106

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA	**: AYU SEPTI HARI NASUTION**
NIM	**: 15 402 00106**
FAKULTAS/JURUSAN	**: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah IE-1**
JUDUL SKRIPSI	**: Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017**

Ketua

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris

Windari, S.E., M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

Anggota

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Windari, S.E., M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	**: Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal	**: Senin/ 29 Juli 2019**
Pukul	**: 14.00 WIB s/d 16.30 WIB**
Hasil/Nilai	**: Lulus/ 76,25 (B)**
Index Prestasi Kumulatif	**: 3,40**
Predikat	**: SANGAT MEMUASKAN**

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI	:	**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2017**
NAMA	:	**AYU SEPTI HARI NASUTION**
NIM	:	**15 402 00106**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 16 Agustus 2019
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP.19780818 200901 1 015

Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan petunjuk kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan, dengan judul **"Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017"**. Serta shalawat beriringkan salam peneliti hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kealaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN). Dalam penelitian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu peneliti menerima kritik dan saran pembaca. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan, dorongan, motivasi dan bimbingan hingga skripsi ini selesai. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan. Kepada Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Bapak Dr. Anhar M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umun, perencanaandan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umun, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardana, M.Si, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staff Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, motivasi dan masukan kepada peneliti selama proses perkuliahan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa dan terimakasih yang tak ternilai kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta Fatimah Sari Siregar dan Ayahanda tercinta Hasan Basri Nasution yang telah banyak melimpahkan pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan do'a tulus yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Terima kasih juga kepada abangku Doli Ashari Nasution dan seluruh keluarga besar.
8. Terkhusus terimakasih kepada Ashar Iskina Hasibuan yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Ilmu Ekonomi (ES/IE-I) angkatan 2015, terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian sampaikan kepada peneliti.
10. Teruntuk sahabat-sahabatku Anita Suryani Rangkuti, Kendedes Ritonga, Tanti Elmiah, Enni Muniroh Rangkuti yang telah memberikan semangat dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah bapak/ibu dan saudara-saudari berikan amat sangat berharga, peneliti mungkin belum dapat membalasnya, tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa. Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan rahmat dan karunia Allah SWT.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti, sehingga peneliti menerima saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penulisan ilmiah ini. Akhir kata peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidimpuan, 23 Mei 2019
Peneliti,

AYU SEPTI HARI NASUTION
NIM. 15 402 00106

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....َ.....ى	fatḥahdan alif atau ya	ā	a dan garis atas
..ِ..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...ُو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikutioleh kata yang menggunaka n kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda,tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim*, maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengankata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalamtransliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Nama : AYU SEPTI HARI NASUTION
NIM : 15 402 00106
Judul :Pengaruh Pajak daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) yang cenderung mengalami fluktuasi. Secara teori pajak daerah dan retribusi daerah berhubungan positif terhadap PAD, apabila pajak daerah dan retribusi daerah meningkat akan meningkatkan PAD. Pada tahun 2013-2017 terdapat beberapa kabupaten yang mengalami peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah tetapi tidak diikuti dengan peningkatan PAD dan terdapat pula beberapa kabupaten yang mengalami penurunan pajak daerah dan retribusi daerah tetapi PAD mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah yang meningkat akan meningkatkan PAD.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang dilakukan dengan menggunakan data panel yaitu gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data dokumentasi yang tersedia, yaitu data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara pada tahun 2013 sampai 2017 sebanyak 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan pengolahan data digunakan melalui program *Eviews* 9.

Berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa secara parsial pajak daerah memiliki $t\text{-}_{hitung} > t\text{-}_{tabel}$ atau 2.888544 > 1.70329 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap PAD, dan secara parsial retribusi daerah memiliki $t\text{-}_{hitung} > t\text{-}_{tabel}$ atau 4.346681 > 1.70329 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki $F\text{-}_{hitung} > F\text{-}_{tabel}$ atau 61,35184 > 3,35 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama siginifikan mempengaruhi PAD.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul
Halaman Pengesahan Pembimbing
Surat Pernyataan Pembimbing
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi
Berita Acara Munaqasyah
Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Definisi Operasional Variabel 9
E. Rumusan Masalah 10
F. Tujuan Penelitian 11
G. Manfaat Penelitian 11
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II LANDASAN TEORI 15

A. Kerangka Teori 15
1. Pendapatan Asli Daerah 15
a) Pengertian PAD 15
b) Sumber-Sumber PAD 15
2. Pajak Daerah 16
a) Pengertian Pajak 16
b) Pajak Dalam Islam 18
c) Karakteristik dan Unsur Pajak 22
d) Fungsi Pajak 23
e) Jenis Pajak 23
f) Pengelompokan Pajak 24
g) Pengenaan Pajak 26
h) Sistem Pemungutan Pajak 27
i) Teori-teori Dalam Pemungutan Pajak 28

j) Hukum Pajak 29
3. Retribusi Daerah 30
1) Pengertian Retribusi Daerah 30
2) Jenis Retribusi Daerah 30
3) Objek Retribusi Daerah 33
4) Subjek Retribusi Daerah 34
5) Prinsip dan Sasaran Penetapan tariff Retribusi 35
B. Penelitian Terdahulu 37
C. Kerangka Pikir 40
D. Hipotesis 41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 42
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 42
B. Jenis Penelitian 42
C. Populasi dan Sampel 42
1. Populasi 42
2. Sampel 43
D. Jenis dan Sumber Data 44
E. Teknik Analisis Data 44
1. Uji Estimasi Data Panel 44
a. *Common Effect* 44
b. *Fixed Effect* 45
c. *Random Effect* 45
2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel 45
a. Uji Chow 46
b. *Hausman Test* 46
c. Uji LM 47
3. Uji Asumsi Klasik 47
a. Uji Normalitas 47
b. Uji Multikolinearitas 48
c. Uji Autokorelasi 48
d. Uji Heterokedastisitas 49
4. Uji Hipotesis 50
a. Uji t (Parsial) 50
b. Uji F (Simultan) 50
c. Koefisien Determinasi (R^2) 51
5. Regresi Linier Berganda 51

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umun Provinsi Sumatera Utara 54
1. Lokasi dan Keadaan Geografis 55

2. Iklim 55
B. Gambaran Umum Variabel 56
1. Pajak Daerah 56
2. Retribusi Daerah 58
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 59
C. Hasil Estimasi 61
1. Pemilihan Model Estimasi Data Panel 61
a. Uji Chow 62
b. *Hausman Test* 63
c. Uji LM 64
2. Uji Asumsi Klasik 65
a. Uji Normalitas 65
b. Uji Multikolinearitas 66
c. Uji Autokorelasi 67
d. Uji Heterokedastisitas 68
3. Uji Hipotesis 69
a. Uji t (Parsial) 69
b. Uji F (Simultan) 71
c. Koefisien Determinasi (R^2) 73
4. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda 73
5. Pembahasan Hasil Penelitian 75
1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD 76
2. Pengaruh Retribusi Terhadap PAD 77
3. Pengaruh Pajak dan Retribusi Terhadap PAD 78
6. Keterbatasan Penelitian 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD 6

Tabel 1.2 Definisi Operasional Variabel 5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 35

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 6 Kabupaten Kota 43

Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Daerah di 6 Kabupaten/Kota 56

Tabel 4.2 Penerimaan Retribusi Daerah di 6 Kabupaten/Kota 58

Tabel 4.3 Penerimaan PAD di 6 Kabupaten/Kota 60

Tabel 4.4 Hasil Uji Model Estimasi 61

Tabel 4.5. Hasil Uji Chow 62

Tabel 4.6. Hasil Uji *Hausman Test* 63

Tabel 4.7. Hasil Uji LM 64

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas 66

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi 68

Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas 69

Tabel 4.11 Hasil Uji t 70

Tabel 4.12 Hasil Uji F 72

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 73

Tabel 4.14 Hasil Estimasi 74

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Model Kerangka Pikir 40

Gambar 3.1 Kerangka Uji Penelitian 53

Gambar 4.1 Penerimaan Pajak Daerah di 6 Kabupaten/Kota 57

Gambar 4.2 Penerimaan Retribusi Daerah di 6 Kabupaten/Kota 58

Gambar 4.3 Penerimaan PAD di 6 Kabupaten/Kota 60

Gambar 4.4 Hasil uji Normalitas 66

DAFTAR LAMPIRAN

Lempiran 1	Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017
Lampiran 2	Hasil Uji Common Effect
Lampiran 3	Hasil Uji Fixed Effect
Lampiran 4	Hasil Uji random Effect
Lampiran 5	Hasil Uji Chow
Lampiran 6	Hsil Uji Hausman
Lampiran 7	Hasil uji LM
Lampiran 8	Hasil Uji Normalitas
Lampiran 9	Hasil Uji Multikolinearitas
Lampiran 10	Hasil Uji Autokorelasi
Lampiran 11	Hasil Uji Heterokedastisitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Otonomi daerah yang berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, membahas tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan massyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.Sumber keuangan daerah salah satu yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD).[1]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 285 ayat 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaandaerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena

[1]Novi Andriani dan Amin Purnawan, "Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Provinsi Jawa Timur", Jurnal Hukum Khairah Ummah Vol. 12 No. 1, 2017, hlm. 59.

potensi yang berbeda. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling potensial yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakat bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Pendapatan asli daerah berdasarkanUndang-Undang Republik IndonesiaNomor 23 tahun 2014adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.[2]Semakin tinggi pemasukan PAD nya maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatau daerah.

Kurang optimalnya PAD dalam kontribusi pada sumber pendapatan daerah menandakan kurangnya juga dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pengoptimalan PAD dilakukan dengan cara lebih ditekankan lagi dalam penggalian potensi-potensi sumber daya daerah.[3]

---

[2]Undang-Undang Republik IndonesiaNo. 23 tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah,* hlm. 151.

[3]Novi Andriani dan Amin Purnawan, *Op.Cit.*, hlm. 60.

Dalam hidupnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, manusia tidak dapat hidup sendirian, dalam kelompok paling kecil sekalipun. Buktinya adalah manusia hidup dan berkembang melalui kehidupan dalam keluarga dan dengan sesamanya.Didalam keluarga, setiap manusia berusaha untuk senantiasa memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Dalam lingkungan kehidupannya manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat yang untuk tataran lebih besar akan terjelma kedalam suatu wadah negara. Organisasi seperti itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masayarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk.Satu diantaranya adalah pajak.[4]

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pembiayaan suatu negara dalam menyelenggarakan pembangunan dan menunjang pemerintahan. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi daerah secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalianyang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

[4]Y. Sri Pudyatmoko, *Pengamtar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 1.

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[5] Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah, pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat luas.

Secara ekonomi, pajak dapat disefenisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib member balas jasa langsung.[6]

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan poemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.[7]

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah bisa dipungut berkali-kali sepanjang masyarakat tersebut memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan

---

[5]Dwiarso Utomo, dkk. *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi offset, 2011), hlm. 1.

[6]Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UniversitasIndonesia, 2008), hlm. 446.

[7]Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm. 12-14.

memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan keperluan daerahnya. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi usaha, dan retribusi perizinan tertentu.[8]

Setiap individu, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah juga ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang harus sesuai dengan azas-azas yang melandasi pemungutan pajak dan retribusi.

Pajak dalam Islam memiliki hubungan dengan syariat yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Mu'amalah),* oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan maka dapat menjadi alat penindas rakyat. Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti, yaitu hak milik penuh sang raja). Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah SWT), maka dia adalah zalim (QS. Al-Maidah [5]: 45).[9]

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat dari perkembangan PAD. Hal ini disebabkan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dari bagian PAD. Anggaran PAD Sumatera Utara tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

[8]*Ibid*, hlm. 14.
[9]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 20.

Tabel 1.1
Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota	Pajak daerah	Retribusi daerah	PAD
2013	Nias Utara	7,000,000	500,000	12,500,000
2014		6,500,000	1,500,000	15,000,000
2015		6,500,000	1,500,000	30,000,000
2016		5,900,000	2,100,000	28,000,000
2017		3,945,000	1,360,000	32,005,000
2013	Nias Barat	3,600,000	2,000,000	8,200,000
2014		3,600,000	2,000,000	10,000,000
2015		7,594,400	3,829,500	20,000,000
2016		7,594,400	3,829,500	24,000,000
2017		8,562,900	3,796,000	28,740,000
2013	Nias Selatan	10,794,743	36,319,166	75,541,198
2014		17,748,994	37,203,232	76,559,502
2015		15,330,442	29,686,215	50,640,920
2016		3,932,834	4,785,675	14,110,807
2017		4,542,498	3,389,889	14,160,411
2013	Humbang Hasundutan	3,167,028	6,974,502	15,212,701
2014		3,961,715	17,640,162	26,959,179
2015		3,961,715	3,863,511	27,752,527
2016		5,159,233	4,458,583	35,045,117
2017		6,029,770	4,573,173	41,679,311
2013	Pakpak Barat	1,134,706	4,352,064	9,335,245
2014		1,186,534	4,816,911	10,498,445
2015		2,144,273	3,345,872	14,960,679
2016		1,998,842	4,247,300	15,235,187
2017		4,391,000	11,046,720	24,297,176
2013	Tanjung Balai	7,083,418	12,915,852	32,035,000
2014		8,583,418	14,488,537	34,409,306
2015		2,708,466	2,033,736	5,940,728
2016		10,658,500	25,601,771	63,898,624
2017		11,658,500	26,018,569	65,315,422

Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa daerah yang memilikijumlah PAD tertinggi yakni Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2014 dan yang memiliki jumlah PAD terendah adalah Kabupaten Tanjung Balai. Kemudian daerah yang memiliki jumlah pajak tertinggi adalah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2014 dan yang memiliki jumlah pajak terendah adalah Pakpak Barat pada tahun 2013. Selanjutnya daerah yang memiliki jumlah retribusi tertinggi adalah Nias Selatan pada tahun 2014 dan yang memiliki jumlah retribusi terendah adalah Nias Utara pada tahun 2013.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhubungan positif dan berpengaruh terhadap PAD. Jika penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat maka PAD juga akan meningkat. Namun terdapat masalah pada Kabupaten Nias Utara yang mana pada tahun 2017 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nya menurun tetapi PAD nya meningkat, kemidian Kabupaten Humbang Hasundutan yang mana pada tahun 2015 Pajak Daerah memiliki jumlah tetap dan Retribusi Daerah menurun tetapi PAD nya meningkat.

Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Dina Anggraeni yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu. Yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh Terhadap Peningkatan PAD Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD. Oleh sebab itu peneliti meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Sumatera Utara. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PengaruhPajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017".**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi.
2. Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Provinsi Sumatera Utara setiap Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Provinsi Sumatera Utara setiap Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang dikaji perlu dilakukan pembatasan masalah.Pembatasan masalah dalam penelitian meliputi pembatasan terhadap objek penelitian (pembahasan dan

variabel) dan subjek penelitian (tempat/studi kasus). Penulis membatasi masalah pada Pengaruh Pajak Daerah (X1) Dan Retribusi Daerah (X2) Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) (Y) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017 di 6 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional Variabel yaitu penjelasan yang mampu mengemukakan indikator-indikator dari setiap variabel yang akan diteliti. Indikator-indikator variabel inilah yang harus dijelaskan dalam bagian kerangka teori dan sebagai acuan dalam merumuskan item-item pertanyaan pada instrumen penelitian berupa angket dan wawancara. Pendefenisian dan penjabaran indikator-indikator ini tentu harus didasarkan pada beberapa pendapat ahli tentang variabel penelitian yang akan diteliti tersebut.

Tabel 1.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pajak Daerah (X_1)	Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.	1. Pajak Hotel. 2. Pajak Restoran. 3. Pajak Hiburan. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Penerangan Jalan. 6. Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C. 7. Pajak Parkir. 8. Pajak lain-lain.[10]	Rasio

[10]Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2008 (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm. 12.

Retribusi Daerah (X_2)	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	1. Retribusi Jasa Umum. 2. Retribusi Jasa Usaha. 3. Retribusi Perizinan Tertentu.[11]	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).	1. Pajak Daerah. 2. Retribusi Daerah. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Lain-lain PAD yang sah.[12]	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Daerahberpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai?
3. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai?

[11]*Ibid*, hlm. 14-15.

[12]Undang-Undang Republik IndonesiaNo. 23 tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*, hlm. 151.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahuiRetribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.
3. Untuk mengetahui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

G. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengalaman, serta untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengambil kebijakan dalam mengawasi dan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

3. Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini berguna untuk lebih mendalami hal-hal yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

J. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini terarah dan memudahkan peneliti dalam meyusunnya, maka Sistematika Pembahasan dalam prposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Defenisi Operasional Variabel, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.Identifikasi masalah yaitu berisi uraian-uraian yang mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian serta pentingnya masalah diteliti dan dibahas.Batasan masalah yaitu penelti membatasi ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Rumusan masalah yaitu penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab oleh peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus mengenai masalah peneliti. Defenisi operasional variabel yaitu menjelaskan secara operasional tentang setiap variabel yang akan diteliti oleh peneliti kemudian penjelasan definisi operasioanl variabel ini akan mengemukakan indicator-indikator variabel yang akan diteliti. Tujuan penelitian yaitu jawaban atas rumusan masalah

dibuat dalam pernyataan-pernyataan. Manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini dapat dijelaskan dalam tiga bentuk yakni manfaat bagi peneliti, manfaat bagi pemerintah dan manfaat bagi dunia akademik.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi Kerangka Teori, Kerangka Pikir, PenelitianTerdahulu, dan Hipotesis.Kerangka teori adalah pembahasan dan uraian tentang objek penelitian sesuai dengan konsep atau teori yang diambil dari berbagai referensi dalam penelitian.Penelitian terdahulu adalah memuat beberapa penelitian dari orang lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir adalah memaparkan pemikiran peneliti tentang variabel atau masalah yang akan diteliti. Hipotesis adalah jawaban sementara dari hasil kerangka teori kemudian di uji kebenarannya melalui hasil analisis data.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Lokasi Dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi Dan Sampel, Jenis Dan Sumber Data,dan Tekhnik Analisis Data.Lokasi dan waktu penelitian yaitu uraian yang menjelaskan tempat dilakukan penelitian dan rentang waktu pelaksanaan penelitian yang dimulai dari awal penulisan proposal himgga penulisan laporan penelitian terakhir.Jenis penelitian menjelaskan pendekatan yang dilakukan berupa penelitian kuantitatif.Populasi dan sampel yaitu ada hubungannya dengan generalisasi.Untuk penelitian pustaka, pengumpulan data dan jenis

pendekatan dengan menelaah buku-buku yang menjadi sumber data.Analisis data menggunakan Eviews 9.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi mengenai hasil penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari keselurihan isi skripsi yang memuat Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran. Kesimpulan memuat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang disimpulkan dari hasil penelitian bab IV. Saran-saran yaitu memuat pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keluluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.[1]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[2]

b) Sumber-Sumber PAD

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

---

[1]Christina Ratih P "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah" (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2010), hlm. 9.

[2]Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

1) Pajak Daerah, merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2) Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[3]
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah, merupakan penerimaan dari PAD yang bukan merupakan Klasifikasi PAD yang disebutkan Sebelumnya.[4]

2. Pajak Daerah

a) Pengertian Pajak

Pajak menurutRochmat Soemitroadalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan

[3]Mardiasmo, Perpajakan Edisin Revisi 2008 (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm. 12-14.

[4]Sunanto, *"Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Msi Banyuasin",* Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 4.

tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkandan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak MenurutSoeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.[5]

Pajak MenurutP. J. A. Andriani adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang wajib membayanya menurut peraturan-peraturandengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubunga dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[6]

Berdasarkan ketiga pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan manfaatnya tidak dirasakan secara langsung dan digunakan untuk pembangunan.

Sedangkan pengertian Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

[5]Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 1-3.
[6]Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 23.

membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.[7]

b) Pajak Dalam Islam

Secara etimologi, Pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *ḍharibah*, yang berasal dari kata dasar يضر ب, ضر باضر ب, yang artinya mewajibkan, menetapkan, meneNtukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.

Secara bahasa *ḍharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *ḍharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *ḍharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *ḍharibah*. Jadi, *ḍharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya dikategorikan *ḍharibah*.[8]

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai pajak adalah QS. At-Taubah ayat 29:

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ

[7]Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm. 12.
[8]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 28.

ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟
ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk".(Q.S. At-Taubah : 29).[9]

Pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban.[10]

Ada 3 ulama yang memberikan defenisi tentang pajak, yaitu sebagai berikut:

1) Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di

[9]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 191.

[10]Gusfahmi, *Op., Cit*, hlm. 160.

satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2) Gazy Inayah

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3) Abdul Qadim Zallum

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi *baitul mal* tidak ada uang atau harta.[11]

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*ḍharibah*) menurut Syariat Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:

1) Pajak (*ḍharibah)* bersifat kontemporer, tidak bersifat kontinu hanya boleh dipungut ketika dibaitul mal tidak ada harta atau uang. Ketika *baitul mal* sudahterisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan

[11]*Ibid.*,hlm. 31.

(*mustahik*), sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).

2) Pajak (*ḍharibah)* hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.sedangkan pajak menurut non islam diajukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

3) Pajak (*ḍharibah)* hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non muslim. Sedangkan teori pajak non Islam tidak membedakan muslin dan non muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

4) Pajak (*ḍharibah)* hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.[12] Dalam pajak non islam, kadang kala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) arau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

[12]*Ibid.*,hlm. 33.

5) Pajak (*ḍharibah)* hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-muslim tidak ada batasan pemungutan selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.
6) Pajak (*ḍharibah)* dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.dan ada suatu ungakapan orang inggris yang mengatakan bahwa ada dua hal yang pasti di dunia ini yaitu kematian dan pajak.[13]

c) Karakteristik dan Unsur Pajak

1) Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.
2) Terhadap pembayaran pajak tidak ada *tegen* prestasi yang dapat ditunjuk secara langsung.
3) Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
4) Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.

[13]*Ibid*., hlm. 34.

5) Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk mamsukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi *budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni mengatur.[14]

d) Fungsi Pajak

1) Fungsi *Budgeter*, pajak sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2) Fungsi*Regulerend*(Mengatur), pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti:

- Mengadakan perubahan-perubahan tarif dan.
- Memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu.[15]

e) Jenis Pajak

1) Pajak provinsi, terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

---

[14]Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 4-5.

[15]Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm.2-3.

- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
   - Pajak Hotel.
   - Pajak Restoran.
   - Pajak Hiburan.
   - Pajak Reklame.
   - Pajak Penerangan Jalan.
   - Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
   - Pajak Parkir.[16]

f) Pengelompokan Pajak

1) Menurut Golongan
   - Pajak Langsung, adalah Pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapatdilimpahkan ataudibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

     Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
   - Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketika.

     Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

[16]Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 15.

2) Menurut Sifat

- Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

  Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

  Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumu dan Bangunan (PBB).[17]

3) Menurut Lembaga Pemungut

- Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.[18]

---

[17]Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 7-8.
[18]*Ibid*., hlm. 8.

g) Pengenaan Pajak

1) Stelsel Pajak

a. Stelsel *Riil* (Nyata)

Dalam stelsel nyata ini Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan objek pajak yang sesungguhnya.Apabila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan, misalnya, maka pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diterima atau diperoleh oleh wajib pajak.

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Stelsel anggapan Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan hukum tertentu.Sekalipun dasarnya adalah anggapan, anggapan itu tidaklah dengan serta-merta dan sembarangan saja.[19]

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan perpaduan antara stelsel nyata dan anggapan dalam stelsel campuran ini utang pajak dikenakan dengan mendasarkan stelsel *fictie* pada awal masa/tahun pajak yang merupakan ketetapan yang bersifat sementara, dan kemudian setelah masa/tahun pajak berakhir akan dikoreksi berdasarkan keadaan penghasilan yang sesungguhnya diterima oleh wajib pajak.

---

[19]Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 77-78.

h) Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official assessment System*

Official assessment merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.Ciri-ciri sistem ini adalah:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self assessment System*

Selfassessment System merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah:[20]

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

[20]*Ibid*, hlm. 78-80.

3) *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiskus* dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.[21]Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.[22]

i) Teori-Teori Dalam Pemungutan Pajak

1) Teori Asuransi

Bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan,sebagaimana terdapat dalam asuransi pertanggungan.

2) Teori Kepentingan

Sudah selayaknya apabila biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk kepentngan penduduk (termasuk perlindungan terhadap jiwa dan harta) dibebankan terhadap rakyat.[23]

3) Teori Gaya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak adalah terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta sehingga wajar apabila biaya yang

[21]*Ibid*, hlm. 81-82.
[22]*Ibid*, hlm. 82.
[23]Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm.10.

telah dikeluarkan oleh negar tersebut dipikulkan kepada yang menikmatinya.

4) Teori Bakti

Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara.

5) Teori Gaya Beli

Yang dimaksud dengan teori ini adalah mengambil gaya beli dari rumah-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud memelihara kehidupan masyarakat.[24]

j) Hukum Pajak

Hukum pajak adalah hukum yang mengatur hubungan pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak.

1) Hukum Pajak Material, yaitu hukum yang memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa, kejadian, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan timbul dan hapusnya hutang pajak.
2) Hukum Pajak Formil, yaitu hukum yang memuat tentang tatacara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak material).[25]

---

[24]*Ibid*, hlm. 10.

[25]Zulia Hanum dan Rukmini, *Perpajakan* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), hlm. 3-4.

3. Retribusi daerah

1) Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah.[26]

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[27]

2) Jenis Retribusi Daerah

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

- Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi. Disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatn umum.

[26]Tony Masyahrul, *Op.Cit*, hlm. 2.
[27]Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm. 14.

- Jasa tersebut layak untuk dikenakan distribusi.
- Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Retribusi Pelayanan Pasar.[28]
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b) Retribusi Jasa Usaha

[28]*Ibid*, hlm. 15.

Retribusi JasaUsaha ditetapkan dengan peraturan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Retribusi jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan tertentu.
- Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha antara lain sebagai berikut:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Retribusi Pasar Grosir Dan/atau Pertokoan.
- Retribusi Tempat Pelelangan.
- Retribusi Terminal.
- Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan Atau Villa.[29]
- Retribusi Penyediaan Kakus.
- Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
- Retribusi Penyeberangan di Atas Air.

[29]*Ibid*, hlm. 15-16.

- Retribusi Pengolahan Air Limbah Cair.
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi perizinan tertentu adalah:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Retribusi Izin Gangguan.[30]
- Retribusi Izin Trayek.

3) Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah terdiri dari:

a) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

[30] *Ibid*, hlm. 16.

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

c) Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatn ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

4) Subjek Retribusi daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.[31]

b) Retribusi perizinan jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayan jasa usaha yang bersangkutan.

c) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

[31]*Ibid*, hlm. 16.17.

5) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
b) Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.[32]
c) Retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.[33]

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membutuhkan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1	Dina Anggraeni (Tahun 2010)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap	Dependen: Pendapatan Asli Daerah Independen: Pajak Daerah	Hasil Penelitian ini dari hasil uji-F dan uji-t Menunjukkan Pajak Daerah Retribusi Daerah berpengaruh

[32]*Ibid*, hlm. 17.
[33]*Ibid*, hlm. 17.

		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta).	Dan Retribusi Daerah	terhadap peningkatan PAD Provinsi Bengkulu.
2	Eka Putriani (Tahun 2016)	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukamba (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).	Dependen: Pendapatan Asli Daerah Independen: Retribusi Daerah	Hasil Penelitian Ini Dari Hasil Uji-F Dan Uji-t Menunjukkan Pengaruh Retribusi Daerah tidak signifikan tetapi berpengaruh positif Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Bulukamba.
3	Ahmad Syahrir Maulana (Tahun 2013)	Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli daerah Kota Palu (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasssar).	Dependen: Pendapatan Asli Daerah Independen: Pajak Hotel	berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palu masih relatif rendah.
4	Nurazizah Situmorang (Tahun 2017)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan).	Dependen: Pendapatan Asli Daerah Independen: Pajak Daerah	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial ada pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Sibolga.

5	Novriyanti Jambak (Tahun 2016)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2014 (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan).	Dependen: Pendapatan Asli Daerah Independen: Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Tahun 2005-2014.
6	Sunanto (Tahun 2015)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin.	Dependen: Pendapatan Asli Daerah Independen: Pajak Daerah	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Dari penelitian terdahulu diatas, terdapat Perbedaan dan Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian yang dilakukan oleh Dina anggraeni memiliki tiga variabel yaitu Pajak daerah sebagai Variabel X1, Retribusi Daerah sebagai variabel X2 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel Y. penelitian ini dilakukan di Provinsi Bengkulu. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni pada variabel X1,X2 dan Y. sedangkan perbedaannya adalah penulis memasukkan perspektif islam

dalam pnelitian dan lokasi penelitian yang dimana penulis melakukan penelitian Pada Provinsi Sumatera Utara.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Putriani memiliki dua varibel yaitu Retribusi Daerah sebagai variabel X dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Y. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukamba. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis menggunakan tiga variabel yakni Pajak daerah sebagai Variabel X1, Retribusi Daerah sebagai variabel X2 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel Y, Penulis melakukan penelitian pada Provinsi Sumatera Utara dan penulis memasukkan perspektif Islam dalam pnelitian. Persamaannya yakni variabel X yang dilakukan oleh Eka sama dengan variabel X2 penulis yaitu Retribusi Daerah dan memiliki variabel Y yang sama.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahrir Maulana memiliki dua variabel yaitu Pajak Hotel sebagai varibel X dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Y. penelitian dilakukan di Kota Palu. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis menggunakan tiga variabel yakni Pajak daerah sebagai Variabel X1, Retribusi Daerah sebagai variabel X2 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel Y, Penulis melakukan penelitian pada Provinsi Sumatera Utara dan penulis memasukkan perspektif Islam dalam pnelitian. Persamaannya yakni variabel Y yang dimiliki Ahmad sama dengan Variabel Y yang dimiliki penulis.

d. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Situmorang memiliki dua varibel yaitu Pajak Daerah sebagai variabel X dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Y. Penelitian ini dilakukan di Kota Sibolga. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis menggunakan tiga variabel yakni Pajak daerah sebagai Variabel X1, Retribusi Daerah sebagai variabel X2 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel Y, Penulis melakukan penelitian pada Provinsi Sumatera Utara. Persamaannya yakni variabel X yang dilakukan oleh Nur Azizah Situmorang sama dengan variabel X1 penulis yaitu Pajak Daerah dan memiliki variabel Y yang sama.

e. Penelitian yang dilakukan oleh Novriyanti Jambak memiliki tiga variabel yaitu Pajak daerah sebagai Variabel X1, Retribusi Daerah sebagai variabel X2 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel Y. penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni pada variabel X1,X2 dan Yserta lokasi penelitian sama dengan penulis.. sedangkan perbedaannya adalah tahun penelitian yang mana Novriyanti Jambak meneliti dari tahun 2005 sampai 2014, sedangkan penulis meneliti dari tahun 2013 sampai 2017.

f. Penelitian yang dilakukan oleh Sunanto memiliki dua varibel yaitu Pajak Daerah sebagai variabel X dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Y. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis

menggunakan tiga variabel yakni Pajak daerah sebagai Variabel X1, Retribusi Daerah sebagai variabel X2 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel Y, Penulis melakukan penelitian pada Provinsi Sumatera Utara. Persamaannya yakni variabel X yang dilakukan oleh Sunanto sama dengan variabel X1 penulis yaitu Pajak Daerah dan memiliki variabel Y yang sama.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran akan peta peneliti mengenai batas-batas yang akan diselidiki dan yang tidak akan tersentuh oleh proses penelitian. Kerangka pemikiran yang beik berisi kerangka pikir yang disusun berdasarkan identifikasi masalah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang meningkat akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah yang akan meningkat pula dan begitu juga sebaliknya.

Gambar 2.1
Model Kerangka Pikir

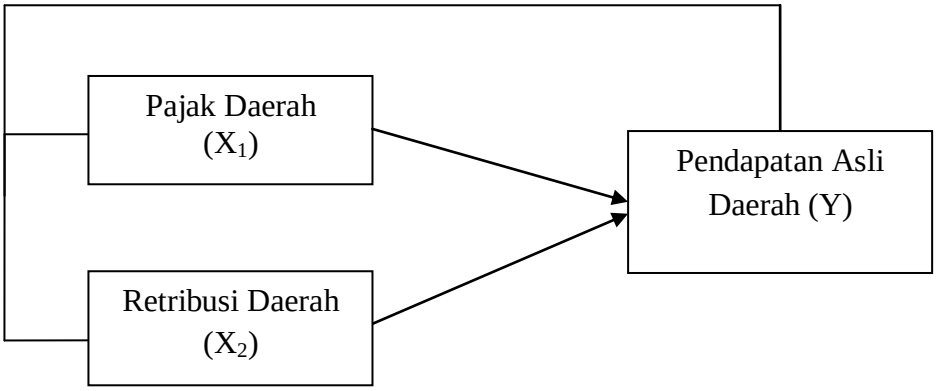

D. Hipotesis

Teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif akan mengidentifikasikan hubungan antarvariabel. Hubungan antarvariabel bersifat hipotesis. Hipotesis merupakan proporsisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua atau lebih variabel yang dikenal sebagai hipotesis kausal.[34]

Berbeda dengan hipotesis satu variabel, hipotesis kausal/sebab akibat memiliki ciri-ciri, yaitu: sekurang-kurangnya mengandung dua variabel, menggambarkan hubungan sebab akibat, dapat memprediksikan hasil yang akan terjadi, berkaitan logis dengan pertanyaan penelitian, dan dapat dibuktikan keberlakuan/ketidakberlakuannya.

H_{a1} = Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

H_{a2} = Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

H_{a3} = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

---

[34]Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode penelitian Kuantitatif (jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 76-77.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di 6 Kota/KabupatenProvinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balaidengan rentang waktu tahun 2013 sampai 2017. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada daerah yang memiliki jumlah PAD terendah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 sampai 2017. Penelitian ini dilakukan mulai Februari 2019 sampai Mei 2019.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah peneltian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berbentuk bilangan, contoh: Tinggi, Panjang atau Umur.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulna.[1] Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2013-2017.

[1]Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 55.

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi. Misalnya, suatu perusahaan sedang diaudit tingkat kesalahan dalam pencatatan rekeningnya. Dari pada semua rekening dalam suatu perusahaan yang jumlahnya, misalnya 5.500 rekening. Seorang auditor bisa saja memilih dan mengamati sampel hanya sebanyak 100 rekening.[2] Sampel yang diperlukan pada penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

Tekhnik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai *tekhnik sampling* yang digunakan,[3] namun teknik yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.[4]

Tabel 3.1
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang dijadikan Sampel Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Nias Utara
2	Kabupaten Nias Barat
3	Kabupaten Nias Selatan
4	Kabupaten Humbang Hasundutan
5	Kabupaten Pakpak Barat
6	Kota Tanjung Balai

[2]Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 118.

[3] Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 217.

[4]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 122.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data panel. Data panel yaitu gabungan antara data runtut waktu (*Time Series*) dan data silang (*Cross Section*). Sumber data penelitian berasal dari data sekunder.Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.Penulis memperoleh data dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.[5]

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Estimasi Data Panel

Dalam model regresi menggunakan data panel, langkah pertama yang dilakukan adalah memilih model yang tepat. Regresi data panel memiliki tiga model. Pertama, *Common Effect model (Pooled Least Square)* dengan metode OLS (*Ordinary Least Square)*. Kedua, *fixed Effect Model* dengan menambah variable dummy pada data panel. Ketiga, *Random Effect Model* dengan menghitung *error* dari data panel menggunakan OLS (*Ordinary Least Square)*.

a. *Common Effect*

Teknik *Common Effect* menggabungkan data *cross section* dengan *time series* dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut. Model ini merupakan

[5]Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian DenganStatistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

model paling sederhana dibandingkan dengan kedua model lainnya. Model ini tidak dapat membedakan varians antara silang tempat dan titik waktu karena memiliki *intercept* yang tetap dan bukan bervariasi secara random.

b. *Fixed Effect*

Teknik yang digunakan dalam metode *fixed Effect* adalah dengan menggunakan variabel *Dummy* unntuk menangkap adanya perbedaan *intercept*. Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope)* tetap antara kabupaten dan waktu.Metode ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom)* yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter.

c. *Random Effect*

Teknik yang digunakan dalam metode *Random Effect* adalah dengan menambah variabel gangguan (*error term*) yang mungkin saja akan saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Pemilihan model estimasi yang tepat dilakukan dengan menggunakan tiga uji lainnya, yaitu Uji Chow (*Likehood Ratio)*, *Hausman Test* dan Uji LM (*Lagrange Multiplier)*.

a. Uji Chow (*Likehood Ratio)*

Uji pertama yang dilakukan dalam menentukan model estimasi terbaik adalah uji Chow.Uji ini dilakukan untuk membandingkan model *Common Effect* dengan *Fixed Effect.*Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_a = *Common Effect Model* yang paling sesuai

H_0 = *Fixed Effect Model* yang paling sesuai

Dasar dengan pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *Chi-Square* hitungdengan *Chi-Square* tabel.

$Chi\text{-}Square_{hitung} > Chi\text{-}Square_{tabel}$ = Hipotesis ditolak (H_0)

$Chi\text{-}Square_{hitung} < Chi\text{-}Square_{tabel}$ = Hipotesis diterima (Ha)

b. *Hausman Test*

Uji selanjutnya dalam menentukan model estimasi terbaik adalah *Hausman Test*. Dalam uji ini model yang akan dibandingkan adalah *Random Effect* dan *Fixed Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

H_a = *Random Effect Model* yang paling sesuai

H_0 = *Fixed Effect Model* yang paling sesuai

Dasar dengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *Chi-Square* hitungdengan *Chi-Square* tabel.

Chi-Square$_{hitung}$>*Chi-Square*$_{tabel}$ = Hipotesis ditolak (H_0)

Chi-Square$_{hitung}$<*Chi-Square*$_{tabel}$ = Hipotesis diterima ($Ha_)$

c. Uji LM (*Lagrange Multiplier)*

Uji selanjutnya dalam menentukan model estimasi terbaik yang terakhir adalah Uji LM (*Lagrange Multiplier)*. Dalam uji ini model yang akan dibandingkan adalah *Common Effect* dan*Random Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

H_a = *Common Effect Model* yang paling sesuai
H_0 = *Random Effect Model* yang paling sesuai

Dasar dengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *Chi-Square* hitungdengan *Chi-Square* tabel.

Test Hypotesis-Cresssection> α = Hipotesis diterima ($Ha_)$

Test Hypotesis-Cresssection< α = Hipotesis ditolak (H_0)

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak.Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik.Jika data menyebar disekitar

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya,[6] model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji kenormalan data juga dapat dilakukan tidak berdasarkan grafik, misalnya dengan uji Kolmogrov-Smirnov.Untuk uji Normalitas data, penulis menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi diantara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas.[7]

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang

---

[6]Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 79.

[7]Shochrul R. Ajija, dkk, *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.35.

waktu berkaitan satu sama lain.[8]Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

H_0= Tidak Terdapat autokorelasi.

H_a = Terdapat autokorelasi.

Dalam penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila (4-DW) ≥ dU = Hipotesis diterima (H_a), berarti tidak ada autokorelasi.
- Bila (4-DW) ≤ dL = Hipotesis ditolak (H_0), berarti ada autokorelasi.
- Bila dL <(4-DW) < dU = uji itu hasilnya tidak konklusif, sehingga tidak dapat ditemukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak.[9]

d. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

H_0= Tidak Terdapat heterokedastisitas.

H_a= Terdapat heterokedastisitas.

---

[8]Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), Hlm. 107.

[9]Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 161.

Pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari nilai *p-value* dibandingkan dengan nilai *alph.* Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

p-value> α = Hipotesis diterima (H_a)

p-value< α = Hipotesis ditolak (H_0)

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis yang digunkan dalam uji t dalam pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a1} = Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten NiasUtara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

H_{a2} = Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten NiasUtara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

H_{a3} = Pajak Daerah dan Retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten NiasUtara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variable-variabel independen secara keselurihan terhadap variabel

dependen.Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 = Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

H_a = Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten NiasUtara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat (proporsi persen) variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 atau R^2 adjusted berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik.[10]

5. Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Berganda adalah analisis regresi dengan dua atau lebih *independent variable*.Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai *dependent variable* (Y), juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh *independentvariable* (X) terhadap *dependent variable* (Y). Dengan formulasi umum:

[10]*Ibid.*, hlm. 34.

$$PAD_{it} = \alpha + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 RD_{it} + e_{it}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta.

$\beta 1 \beta 2$ = Koefisien regresi

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

E = Residual/error

i = Tahun

t = Kabupaten/Kota

Gambar 3.1
Kerangka Uji Penelitian

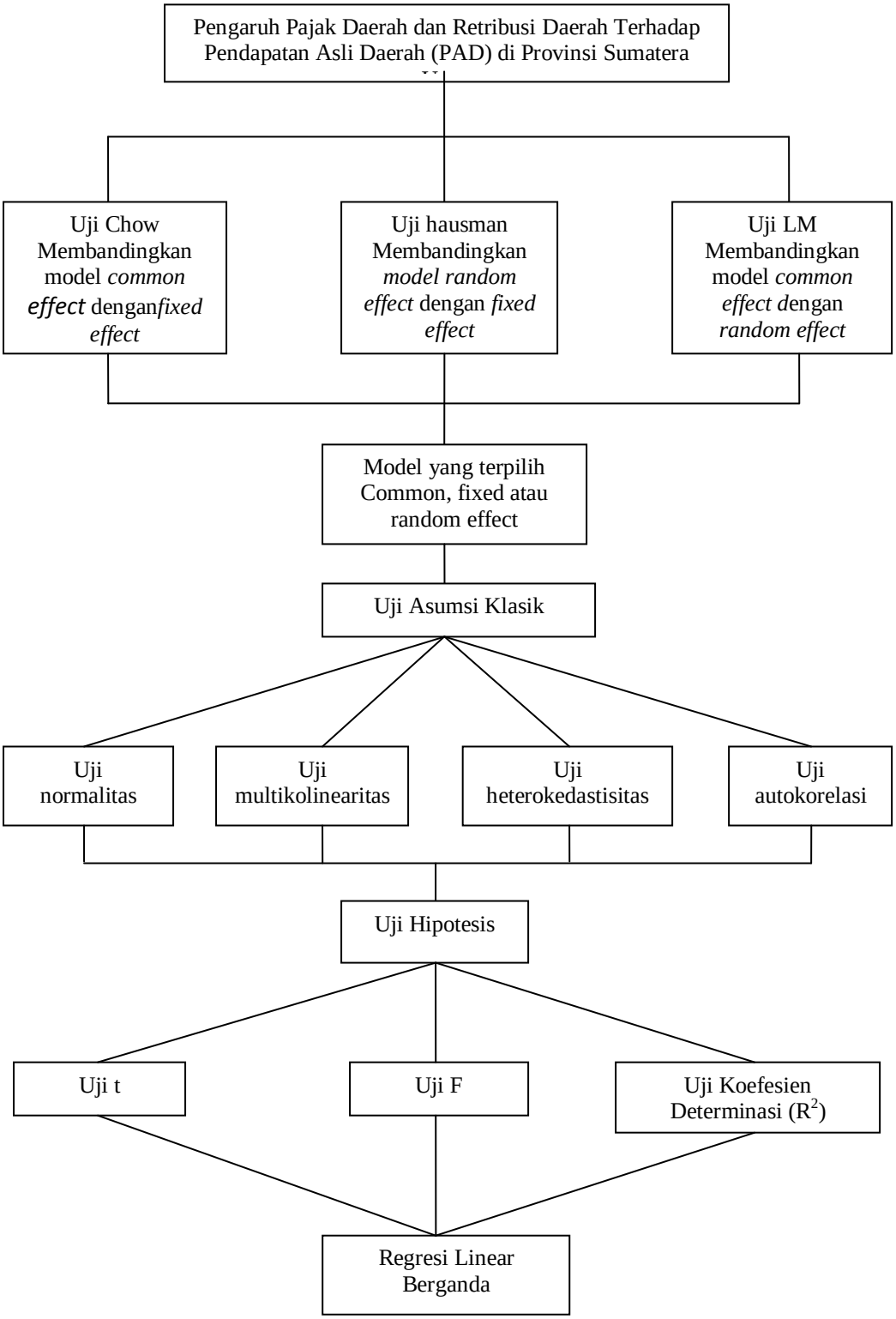

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1^0 – 4^0 Lintang Utara dan 98^0 – 100^0 Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain, disebelah Utara berbatasan dengan Aceh, disebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, disebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan disebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi kabupaten Nias Barat, kabupaten Mandailing Natal, kabupaten Tapanuli Selatan, kabupaten Padang Lawas, kabupaten Padang Lawas Utara, kabupaten Tapanuli Tengah, kabupaten Nias Selatan, kota Padangsidimpuan, kota Sibolga dan kota Gunung Sitoli. Kawasan Dataran Tinggi meliputi kabupaten Tapanuli Utara, kabupaten Toba Samosir, kabupaten Simalungun, kabupaten Dairi, kabupaten Karo, kabupaten Humbang Hasundutan, kabupaten Pakpak Bharat, kabupaten Samosir, dan kota Pematangsiantar. Kawasan pantai timur meliputi kabupaten Labuhan Batu, kabupaten Labuhan Batu Utara, kabupaten Labuhan Batu Selatan, kabupaten Asahan, kabupaten Batu Bara, kabupaten Deli Serdang,[1]

[1]BPS Provinsi Sumatera Utara, *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018* (Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2018), hlm. 5-6.

Kabupaten Langkat, kabupaten Serdang Bedagai, kota Tanjung Balai, kota Tebing Tinggi, kota Medan dan kota Binjai.

1. Lokasi dan Keadaan Geografis

   Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km^2, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau, baik dibagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera.

   Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km^2 atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km^2 atau sekitar 8,40 persen, kemudian kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,00 km^2 atau sekitar 8,26 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km^2 atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.

2. Iklim

   Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter diatas permukaan laut, beriklim cukup panas, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian.[2]

[2] *Ibid*, hlm. 7.

Sebagaimana Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan.Musim kemarau biasanya terjadi pada Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba.

Sumatera Utara juga termasuk kedalam daerah yang sering mengalami kejadian gempa bumi.Sepanjang 2017 tercatat sebanyak 497 kali kejadian gempa bumi.Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 dimana tercatat gempa bumi terjadi sebanyak 548 kali.[3]

B. Gambaran Umum Variabel

1. Pajak Daerah

Sedangkan pengertian Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Juta Rupiah)

Tahun	Nias Utara	Nias Barat	Nias Selatan	Humbang Hasundutan	Pakpak Barat	Tanjung Balai
2013	7,00	3,60	10,79	3,16	1,13	7,08
2014	6,50	3,60	17,74	3,96	1,18	8,58
2015	6,50	7,59	15,33	3,96	2,14	2,70
2016	5,90	7,59	3,93	5,15	1,99	10,65

[3]*Ibid*, hlm. 8.

2017	3,94	8,56	4,54	6,02	4,39	11,65

Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2019

Gambar 4.1
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Juta Rupiah)

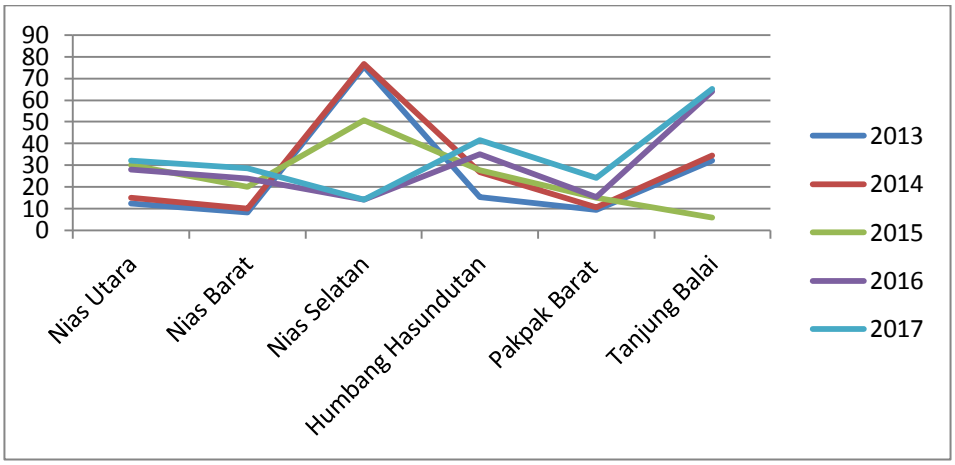

Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 di atas, terlihat bahwa pajak daerah pada tahun 2013 ke tahun 2014 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Nias Utara, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang memiliki nilai tetap adalah Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya pajak daerah pada tahun 2015 ke tahun 2016 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang memiliki nilai tetap adalah Kabupaten Nias Barat dan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Utara, Nias Selatan dan Pakpak Barat. Kemudian pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan dan Pakpak

Barat, sedangkan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Utara dan Kota Tanjung Balai.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Tabel 4.2
Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Juta Rupiah)

Tahun	Nias Utara	Nias Barat	Nias Selatan	Humbang Hasundutan	Pakpak Barat	Tanjung Balai
2013	0,50	2,00	36,31	6,97	4,35	12,91
2014	1,50	2,00	37,20	17,64	4,81	14,48
2015	1,50	3,82	29,68	3,86	3,34	2,03
2016	2,10	3,82	4,78	4,45	4,24	25,60
2017	1,36	3,79	3,38	4,57	11,04	26,01

Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2019

Gambar 4.2
Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Juta Rupiah)

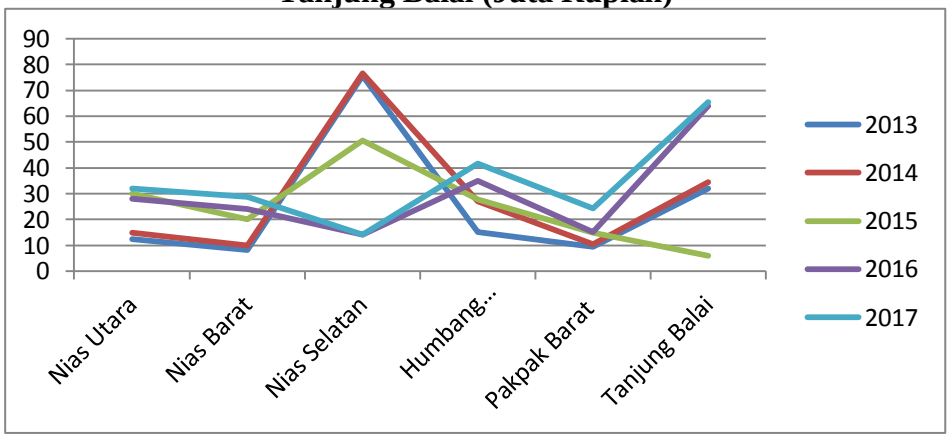

Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.2 di atas terlihat bahwa Retribusi daerah pada tahun 2013 ke tahun 2014 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Nias Utara, Nias Selatan, Humbang hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanung Balai, sedangkan yang memiliki nilai tetap adalah kabupaten Nias Barat. Selanjutnya tahun 2015 ke tahun 2016 yang mengalami peningkatan adalah kabupaten Nias Barat, Humbang hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang memiliki niali tetap adalah kabupaten Nias Barat dan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Selatan. Kemudian pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Kabupaten humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keluluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.[4]

[4]Christina Ratih P "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah" (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2010), hlm. 9.

Tabel 4.3
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Juta Rupiah)

Tahun	Nias Utara	Nias Barat	Nias Selatan	Humbang Hasundutan	Pakpak Barat	Tanjung Balai
2013	12,50	8,20	75,54	15,21	9,33	32,03
2014	15,00	10,00	76,55	26,95	10,49	34,40
2015	30,00	20,00	50,64	27,75	14,96	5,94
2016	28,00	24,00	14,11	35,04	15,23	63,89
2017	32,00	28,74	14,16	41,67	24,29	65,31

Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2019

Gambar 4.3
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Juta Rupiah)

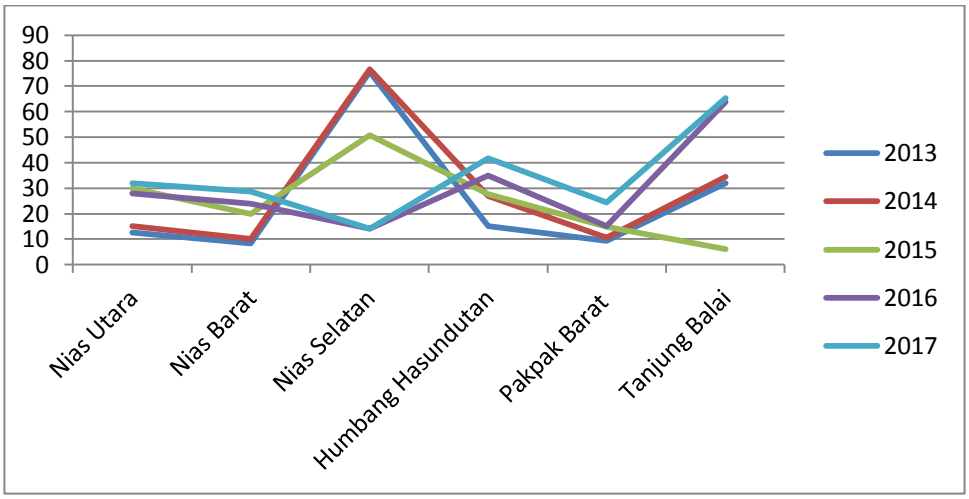

Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2019.

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.3 di atas terlihat bahwa PAD pada tahun 2013 ke tahun 2014 ke enam Kabupaten/Kota sama-sama mengalami peningkatan. Selanjutnya pada tahun 2015 ke 2016 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Nias Barat, humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Utara dan Nias Selatan.

Kemudian pada tahun 2017 ke enam Kota/Kabupaten sama-sama mengalami peningkatan.

C. Hasil Estimasi

1. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Dalam model regresi menggunakan data panel, langkah pertama yang dilakukan adalah memilih model yang tepat. Regresi data panel memiliki tiga model. Pertama, *Common Effect model (Pooled Least Square)* dengan metode OLS (*Ordinary Least Square)*. Kedua, *fixed Effect Model* dengan menambah variable dummy pada data panel. Ketiga, *Random Effect Model* dengan menghitung *error* dari data panel menggunakan OLS (*Ordinary Least Square)*. Ketiga model tersebut diuji satu persatu, dibawah ini adalah hasil uji estimasi dari ketiga model tersebut:

Tabel 4.4
Uji Model Estimasi

Model	Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Commont Effect	C	6991017.	3165712.	2.208356	0.0359
	PD	1.913441	0.662424	2.888544	0.0075
	RD	1.051265	0.241855	4.346681	0.0002
Fixed Effect	C	5089898.	3962350.	1.284566	0.2123
	PD	2.015039	0.926758	2.174290	0.0407
	RD	1.187027	0.350265	3.388942	0.0026
Random Effect	C	6408400.	3613511.	1.773455	0.0874
	PD	1.954643	0.729332	2.680046	0.0124
	RD	1.086153	0.268949	4.038513	0.0004

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Setelah melakukan uji estimasi diatas, selanjutnya dipilih model estimasi yang tepat. Pemilihan model estimasi yang tepat dilakukan

dengan menggunakan tiga uji lainnya, yaitu Uji Chow (*Likehood Ratio), Hausman Test* dan Uji LM (*Lagrange Multiplier)*.

a. Uji Chow (*Likehood Ratio)*

Uji pertama yang dilakukan dalam menentukan model estimasi terbaik adalah uji Chow.Uji ini dilakukan untuk membandingkan model *Common Effect* dengan *Fixed Effect.*Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_a = *Common Effect Model* yang paling sesuai

H_0 = *Fixed Effect Model* yang paling sesuai

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *Chi-Square* hitungdengan *Chi-Square* tabel.

$Chi\text{-}Square_{hitung} > Chi\text{-}Square_{tabel}$ = Hipotesis ditolak (H_0)

$Chi\text{-}Square_{hitung} < Chi\text{-}Square_{tabel}$ = Hipotesis diterima (H_a)

Tabel 4.5
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.351052	(5,22)	0.2805
Cross-section Chi-square	8.033348	5	0.1544

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan uji chow di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Chi-square* yang diperoleh adalah 8,033348 lebih kecil dari nilai *Chi-square* tabel 11,070 sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis diterima (Ha)

dan hasil dari uji ini menyatakan bahwa model yang paling sesuai antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* adalah *Common Effect*.

b. *Hausman Test*

Uji selanjutnya dalam menentukan model estimasi terbaik adalah *Hausman Test*. Dalam uji ini model yang akan dibandingkan adalah *Random Effect* dan *Fixed Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

H_a = *Random Effect Model* yang paling sesuai

H_0 = *Fixed Effect Model* yang paling sesuai

Dasar dengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *Chi-Square* hitungdengan *Chi-Square* tabel.

$Chi\text{-}Square_{hitung} > Chi\text{-}Square_{tabel}$ = Hipotesis ditolak (H_0)

$Chi\text{-}Square_{hitung} < Chi\text{-}Square_{tabel}$ = Hipotesis diterima (H_a)

Tabel 4.6.
Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.023872	2	0.5993

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan uji *Hausman* di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Chi-square* yang diperoleh adalah 1,023872 lebih kecil dari nilai *Chi-square* tabel 5,591, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis diterima (H_a) dan Hasil dari uji ini menyatakan bahwa model yang

paling sesuai antara *Random Effect* dan *Fixed Effect* adalah *Random Effect*.

c. Uji LM (*Lagrange Multiplier)*

Uji selanjutnya dalam menentukan model estimasi terbaik yang terakhir adalah Uji LM (*Lagrange Multiplier)*. Dalam uji ini model yang akan dibandingkan adalah *Common Effect* dan*Random Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

H_0 = *Random Effect Model* yang paling sesuai

H_a = *Common Effect Model* yang paling sesuai

Dasar dengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *Chi-Square* hitungdengan *Chi-Square* tabel.

Test Hypotesis-Cresssection> α = Hipotesis diterima (H_a)

Test Hypotesis-Cresssection< α = Hipotesis ditolak (H_0)

Tabel 4.7
Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.319081	0.712133	2.031214
	(0.2508)	(0.3987)	(0.1541)

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan uji *Lagrange Multiplier* di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Test Hypotesis-Cresssection* adalah 0,2508 lebih besar dari *alpha*

0,05 yang berarti Hipotesis diterima (H_a). Hasil dari uji ini menyatakan bahwa model yang paling sesuai antara *Common Effect* dan*Random Effect* adalah *Common Effect.* Uji terakhir ini menunjukkan bahwa dari ketiga uji yang telah dilakukan model estimasi yang paling sesuai adalah *Common Effect.*

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak.Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik.Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji kenormalan data juga dapat dilakukan tidak berdasarkan grafik, misalnya dengan uji Kolmogrov-Smirnov.[5]Untuk uji Normalitas data, penulis menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

[5]Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 79.

Gambar 4.3
Uji Normalitas

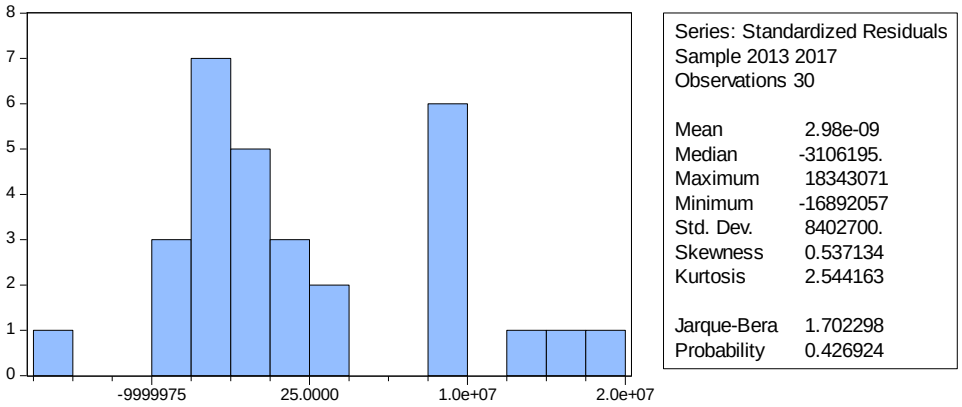

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan hasil uji Normalitas, dapat dilihat pada tabel diatas nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,428924, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi diantara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas.[6].

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas

	PD	RD
PD	1	0.7856474007245576
RD	0.7856474007245576	1

[6]Shochrul R. Ajija, dkk, *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.35.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena koefisien korelasi antar variabel independen masih dibawah syarat adanya multikolinearitas yaitu 0,80. Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai korelasi sebesar 0,78567474007245576, korelasi ini berada dibawah 0,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.[7]Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

Dalam penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila (4-DW) $\geq$ dU = Hipotesis diterima (H_a), berarti tidak ada autokorelasi.
- Bila (4-DW) $\leq$ dL = Hipotesis ditolak (H_0), berarti ada autokorelasi.

[7]Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), Hlm. 107.

- Bila dL < (4-DW) < dU = uji itu hasilnya tidak konklusif, sehingga tidak dapat ditemukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak.[8]

Tabel 4.9.
Uji Autokorelasi

R-squared	0.819644	Mean dependent var	28734416
Adjusted R-squared	0.806284	S.D. dependent var	19785780
S.E. of regression	8708352.	Akaike info criterion	34.89210
Sum squared resid	2.05E+15	Schwarz criterion	35.03222
Log likelihood	-520.3815	Hannan-Quinn criter.	34.93693
F-statistic	61.35184	Durbin-Watson stat	0.859414
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan hasil uji diatas diperoleh nilai DW sebesar 0,859414, sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0.05 (5%) dan jumlah data (n) = 30 dan jumlah variabel (k) = 3 diperoleh nilai dL sebesar1,2138 dan dU sebesar 1,6498. Dimana (4-DW) diperoleh hasil 3,140586 lebih besar dari dU = 1,6498 sehingga H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

H_a = Tidak Terdapat heterokedastisitas.

H_0 = Terdapat heterokedastisitas.

[8]Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 161.

Pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari nilai *p-value* dibandingkan dengan nilain *alpha*. Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

p-value> α = Hipotesis diterima (H_a)

p-value< α = Hipotesis ditolak (H_0)

Tabel 4.10
Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	966551.3	349652.6	2.764319	0.0102
PD	-0.005804	0.073165	-0.079330	0.9374
RD	0.041743	0.026713	1.562645	0.1298

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan Hasil Uji Heterokedastisitas diatas nilai probabilitas dari kedua variabel lebih besar dari α (*alpha)* 0,05, dimana PD sebesar 0,9374 dan RD sebesar 0,1298 lebih besar dari 0,05 sehingga diperoleh hasil yaitu H_a diterima dan disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis yang digunkan dalam uji t dalam pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a1}= Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten NiasUtara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

H_{a2} = Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

H_{a3} = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

Penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05. derajat kebebasan (*degree of freedom)* dihitung menggunakan rumus n-k, dimana n adalah jumlah seluruh observasi dan k adalah jumlah seluruh variabel. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 dan jumlah variabel adalah 3, maka nilai derajat kebebasan yang digunakan adalah 27. Nilai t tabel yang diperoleh adalah 1,70329, ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$t\text{-}_{hitung} > t\text{-}_{tabel}$ = Hipotesis diterima (H_a)

$t\text{-}_{hitung} < t\text{-}_{tabel}$ = Hipotesis ditolak (H_0)

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model estimasi *Common Effect*. Hasil uji estimasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11.
Uji t

Variable	t-Statistic	Prob.
C	2.208356	0.0359
PD	2.888544	0.0075
RD	4.346681	0.0002

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD

Hasil uji t di atas diperoleh t_{hitung} sebesar 2,888544 dan nilai t_{tabel} yang diperoleh sebesar 1,70329. Berdasarkan pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,888544 > 1,70329 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh tehadap PAD.

2) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD

Hasil uji t di atas diperoleh t_{hitung}sebesar 4,346681 dan nilai t_{tabel} yang diperoleh sebesar 1,70329. Berdasarkan pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 4.346681> 1.70329, Sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh tehadap PAD.

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variable-variabel independen secara keselurihan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 = Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

H_a = Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten NiasUtara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

Penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05. derajat pembilang (dk1) dihitung menggunakan rumus k-1, dimana n adalah jumlah seluruh observasi dan k adalah jumlah seluruh variabel. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 dan jumlah variabel adalah 3, maka dk1 adalah 2dan dk2 adalah 27. Nilai F tabel yang diperoleh adalah 3,35 ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$F\text{-}_{hitung} > F\text{-}_{tabel}$= Hipotesis diterima (Ha)

$F\text{-}_{hitung} < F\text{-}_{tabel}$= Hipotesis ditolak ($H_0$)

Tabel 4.12
Uji F

F-statistic	61.35184	Durbin-Watson stat	0.859414
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan uji di atas, diperoleh nlai F_{hitung} sebesar 61,35184, nilai ini lebih kecil dari nilai F_{tabel} sebesar 3,35 yaitu 61,35184 > 3,35, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi daerah secara bersama-sama siginifikan mempengaruhi PAD.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat (proporsi persen) variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 atau R^2 adjusted berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik.

Tabel 4.13
Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.819644	Mean dependent var	28734416
Adjusted R-squared	0.806284	S.D. dependent var	19785780
S.E. of regression	8708352.	Akaike info criterion	34.89210
Sum squared resid	2.05E+15	Schwarz criterion	35.03222
Log likelihood	-520.3815	Hannan-Quinn criter.	34.93693
F-statistic	61.35184	Durbin-Watson stat	0.859414
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan uji diatas, nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,819644, hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mampu menjelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 81,9 persen. Sedangkan sisanya 18,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Berganda adalah analisis regresi dengan dua atau lebih *independent variable.*Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai *dependent variable* (Y), juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh *independent* variable (X) terhadap *dependent variable* (Y).

Hasil estimasi yang diperoleh menggunakan model *Common Effect* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Estimasi

Dependent Variable: PAD
Method: Panel Least Squares
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6991017.	3165712.	2.208356	0.0359
PD	1.913441	0.662424	2.888544	0.0075
RD	1.051265	0.241855	4.346681	0.0002
R-squared	0.819644	Mean dependent var		28734416
Adjusted R-squared	0.806284	S.D. dependent var		19785780
S.E. of regression	8708352.	Akaike info criterion		34.89210
Sum squared resid	2.05E+15	Schwarz criterion		35.03222
Log likelihood	-520.3815	Hannan-Quinn criter.		34.93693
F-statistic	61.35184	Durbin-Watson stat		0.859414
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \alpha + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 RD_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan persamaan diatas, maka diperoleh model regresi secara umum sebagai berikut:

$$PAD = 6.991.017. + 1.913441PDit + 1.051265RD_{it} + 3167512_{it}$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 6.991.017 Artinya jika pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) nilainya 0, maka PAD (Y) nilainya 6.991.017.

b. Koefisien pajak daerah sebesar 1,913441 menunjukkan bahwa apabila pajak daerah meningkat 1 persen maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar Rp.1.913.441 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara pajak daerah dan PAD.

c. Koefisien retribusi daerah sebesar 1,051265 menunjukkan bahwa apabila retribusi daerah meningkat 1 persen, maka PAD mengalami peningkatan sebesar Rp.1.051.265 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antar retribusi daerah dan PAD.

d. Koefisien pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama signifikan mempengaruhi PAD. Nilai F hitung sebesar 61,35184 lebih kecil dari nilai F tabel sebesar 3,35.

5. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017.Dari ketiga hasil uji *Common Effect, Fixed Effect* dan *Random Effect,* dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi *Common Effect*.ketiga hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dua hasil uji menyatakan model estimasi *Common Effect* yang paling sesuai.

Hasil dari penelitian ini sebagaimana telah dicantumkan diatas, yang dianalisis dengan menggunakan eviews versi 9,00 menunjukkan bahwa hasil dari koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,819644. hal ini berarti bahwa variansi variabel PAD secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 81,9 persen sedangkan 18,1 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.Selanjutnya hasil interpretasi dari hasil regresi tersebut terhadap signifikansi masing-masing variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD

   Hasil regresi PAD menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari hasil koefisien sebesar 1,913441 hal ini berarti pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap PAD. Apabila pajak daerah meningkat 1 persen maka PAD akanmengalami peningkatan sebesar Rp.1.913.441dengan asumsi jika variabel lain dianggap tetap.

   Hasil uji t pada tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,888544 dan nilai t tabel yang diperoleh sebesar 1,70329. Berdasarkan pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,888544 > 1,70329, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh tehadap PAD. Dalam penelitian ini pajak daerah searah dan positif artinya semakin tinggi jumlah pajak daerah maka semakin besar peningkatan PAD di Kabupaten Nias

Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

Penerimaan Pajak Daerahmemiliki pengaruh terhadap PAD, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Novrianti Jambak yang berjudul "Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera utara Tahun 2005-2014". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dalam peningkatan PAD di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,43 persen yang berarti apabila penerimaan pajak daerah meningkat maka akan diikuti juga dengan peningkatan PAD sesuai dengan teori bahwa Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD

Hasil regresi PAD menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari hasil koefisien sebesar 1,051265 hal ini berarti retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap PAD. Apabila retribusi daerah meningkat 1 persen maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar Rp.1.051.265dengan asumsi jika variabel lain dianggap tetap.

Hasil uji t pada tingkat signifikansi 0,05 sebesar 4,346681 dan nilai t_{tabel} yang diperoleh sebesar 1,70329. Berdasarkan pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 4.346681 > 1.70329, sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh tehadap PAD. Dalam penelitian ini retribusi daerah searah dan positif artinya semakin tinggi jumlah

retribusi daerah maka semakin besar peningkatan PAD di Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

Penerimaan Retribusi Daerah memiliki pengaruh terhadap PAD, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Novrianti Jambak yang berjudul "Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera utara Tahun 2005-2014". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah dalam peningkatan PAD di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,55 persen yang berarti apabila penerimaan retribusi daerah meningkat maka akan diikuti juga dengan peningkatan PAD sesuai dengan teori bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD.

3. Pengaruh Pajak Daerah danRetribusi Daerah Terhadap PAD

Berdasarkan hasil regresi pada tabel.13 diperoleh persamaan yaitu:

PAD = 6.991.017 + 1.913441PD + 1.051265RD + 3165712

Penerimaan pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai sebesar 1,913441 hal ini berarti pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap PAD. Apabila pajak daerah meningkat 1 persen maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar 1,91 persen dengan asumsi jika variabel lain dianggap tetap.

Hasil regresi diatas menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD. Pajak daerah yang meningkat 1 persen akan meningkatkan PAD sebesar Rp.1.913.441. Demikian juga dengan retribusi daerah, jika meningkat 1 persen maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp.1.051.265.

Hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 61,35184 lebih kecil dari nilai F_{tabel} sebesar 3,35. sehingga H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama signifikan mempengaruhi PAD.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Novrianti Jambak yang berjudul "Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera utara Tahun 2005-2014". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan PAD yang masing-masing sebesar 0,43 persen dan 0,55 persenyang berarti apabila penerimaan pajak daerah meningkat maka akan diikuti juga dengan peningkatan PAD sesuai dengan teori bahwa Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD.

6. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan agar menghasilkan penelitian yang sebaik mungkin, namun untuk memperoleh penelitian yang

sempurna tidaklah mudah. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Variabel bebas yang digunakan hanya dua, sehingga kurang maksimal dalam menjelaskan variabel terikat.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 30 sampel.
3. Periode penelitian yang digunakan hanya 5 tahun pengamatan yaitu tahun 2013 sampai tahun 2017.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial pajak daerah memiliki $t\text{-}_{hitung} > t\text{-}_{tabel}$ atau 2.888544 > 1.70329 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap PAD.
2. Secara parsial retribusi daerah memiliki $t\text{-}_{hitung} > t\text{-}_{tabel}$ atau 4.346681> 1.70329 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD.
3. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki $F\text{-}_{hitung} > F\text{-}_{tabel}$ atau 61,35184> 3,35 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama siginifikan mempengaruhi PAD.

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah Sumatera Utara sebaiknya melakukan penyuluhan atau pemberitahuan tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi.
2. Pemerintah Daerah Sumatera Utara sebaiknya melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan

bagi wajib pajak, sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuha membayar pajak

3. Pemerintah Daerah Sumatera Utara sebaiknya memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebgai wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Pemerintah daerah Sumatera Utara sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan pajak daerah dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Tri Basuki & Nano Prawoto, *Analisis Regresi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, *Metode penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

BPS Provinsi Sumatera Utara, *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018*, Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2018.

Christina Ratih P "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah". Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Firdaus, Muhammad, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif* , Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

_____, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Novi Andriani dan Amin Purnawan, *"Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Provinsi Jawa Timur"*, Jurnal Hukum Khairah Ummah Vol. 12 No. 1, 2017.

Prathama Rahardja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Shochrul R. Ajija, dkk, *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sunanto, *"Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Msi Banyuasin".* Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu Vol. 2 No. 1, 2015.

Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2006.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

_____, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grasindo, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah.*

Utomo, Dwiarso, dkk., *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi offset, 2011.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.

Zulia Hanum & Rukmini, *Perpajakan*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Ayu Septi Hari Nasution
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 23 September 1997
3. Agama : Islam
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Anak ke : 3 dari tiga Bersaudara
6. Alamat : Sadabuan
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/ HP : 085274752029
9. Email : ayuseptiharinst@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200118 Padangsidimpuan (2003-2009)
2. SMP Negeri 4 Padangsidimpuan (2009-2012)
3. SMK Swasta Kampus Padangsidimpuan (2012-2015)
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (2015-2019)

III.DENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Hasan Basri Nasution
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Fatimah Sari Siregar
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Sadabuan

IV. PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3,4
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017.

V. Motto Hidup : Kita Harus Sukses dan Bahagia Meski tidak Terlahir Dari Keluarga Kaya.

Lampiran 1

DATA PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2017

Tahun	Kabupaten/Kota	Pajak daerah	Retribusi daerah	PAD
2013	Nias Utara	7,000,000	500,000	12,500,000
2014		6,500,000	1,500,000	15,000,000
2015		6,500,000	1,500,000	30,000,000
2016		5,900,000	2,100,000	28,000,000
2017		3,945,000	1,360,000	32,005,000
2013	Nias Barat	3,600,000	2,000,000	8,200,000
2014		3,600,000	2,000,000	10,000,000
2015		7,594,400	3,829,500	20,000,000
2016		7,594,400	3,829,500	24,000,000
2017		8,562,900	3,796,000	28,740,000
2013	Nias Selatan	10,794,743	36,319,166	75,541,198
2014		17,748,994	37,203,232	76,559,502
2015		15,330,442	29,686,215	50,640,920
2016		3,932,834	4,785,675	14,110,807
2017		4,542,498	3,389,889	14,160,411
2013	Humbang Hasundutan	3,167,028	6,974,502	15,212,701
2014		3,961,715	17,640,162	26,959,179
2015		3,961,715	3,863,511	27,752,527
2016		5,159,233	4,458,583	35,045,117
2017		6,029,770	4,573,173	41,679,311
2013	Pakpak Barat	1,134,706	4,352,064	9,335,245
2014		1,186,534	4,816,911	10,498,445
2015		2,144,273	3,345,872	14,960,679
2016		1,998,842	4,247,300	15,235,187
2017		4,391,000	11,046,720	24,297,176
2013	Tanjung Balai	7,083,418	12,915,852	32,035,000
2014		8,583,418	14,488,537	34,409,306
2015		2,708,466	2,033,736	5,940,728
2016		10,658,500	25,601,771	63,898,624
2017		11,658,500	26,018,569	65,315,422

Lampiran 2

HASIL MODEL COMMON EFFECT

Dependent Variable: PAD
Method: Panel Least Squares
Date: 07/07/19 Time: 11:28
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6991017.	3165712.	2.208356	0.0359
PD	1.913441	0.662424	2.888544	0.0075
RD	1.051265	0.241855	4.346681	0.0002

R-squared	0.819644	Mean dependent var	28734416
Adjusted R-squared	0.806284	S.D. dependent var	19785780
S.E. of regression	8708352.	Akaike info criterion	34.89210
Sum squared resid	2.05E+15	Schwarz criterion	35.03222
Log likelihood	-520.3815	Hannan-Quinn criter.	34.93693
F-statistic	61.35184	Durbin-Watson stat	0.859414
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 3

HASIL MODEL FIXED EFFECT

Dependent Variable: PAD
Method: Panel Least Squares
Date: 07/07/19 Time: 11:37
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5089898.	3962350.	1.284566	0.2123
PD	2.015039	0.926758	2.174290	0.0407
RD	1.187027	0.350265	3.388942	0.0026

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.862013	Mean dependent var	28734416
Adjusted R-squared	0.818109	S.D. dependent var	19785780
S.E. of regression	8438382.	Akaike info criterion	34.95766
Sum squared resid	1.57E+15	Schwarz criterion	35.33131
Log likelihood	-516.3649	Hannan-Quinn criter.	35.07719
F-statistic	19.63369	Durbin-Watson stat	1.162520
Prob(F-statistic)	0.000000		

lampiran 4

HASIL MODEL RANDOM EFFECT

Dependent Variable: PAD
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/07/19 Time: 11:42
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6408400.	3613511.	1.773455	0.0874
PD	1.954643	0.729332	2.680046	0.0124
RD	1.086153	0.268949	4.038513	0.0004

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	3316559.	0.1338
Idiosyncratic random	8438382.	0.8662

Weighted Statistics

R-squared	0.808441	Mean dependent var	21583646
Adjusted R-squared	0.794251	S.D. dependent var	18263951
S.E. of regression	8284442.	Sum squared resid	1.85E+15
F-statistic	56.97433	Durbin-Watson stat	0.952948
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.818967	Mean dependent var	28734416
Sum squared resid	2.06E+15	Durbin-Watson stat	0.859206

Lampiran 5

HASIL UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.351052	(5,22)	0.2805
Cross-section Chi-square	8.033348	5	0.1544

Lampiran 6

HASIL UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.023872	2	0.5993

Lampiran 7

HASIL UJI LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.319081	0.712133	2.031214
	(0.2508)	(0.3987)	(0.1541)

Lampiran 8

HASIL UJI NORMALITAS

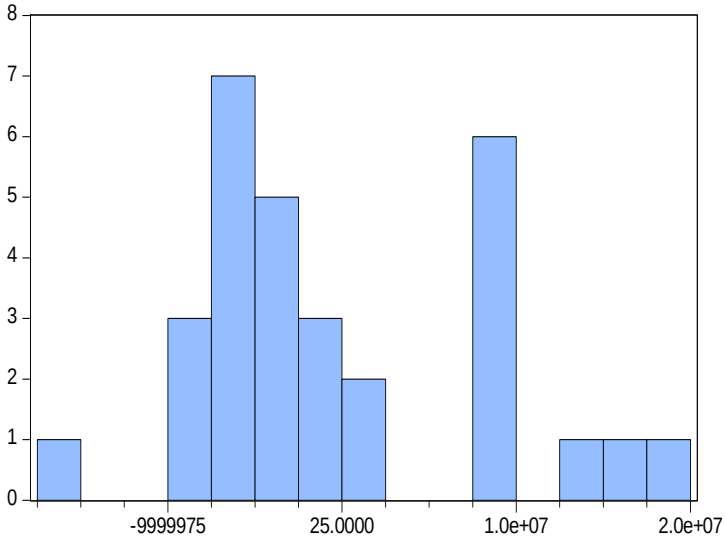

Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2017
Observations 30

Mean	2.98e-09
Median	-3106195.
Maximum	18343071
Minimum	-16892057
Std. Dev.	8402700.
Skewness	0.537134
Kurtosis	2.544163
Jarque-Bera	1.702298
Probability	0.426924

Lampiran 9

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

	PD	RD
PD	1	0.7856474007245576
RD	0.7856474007245576	1

Lampiran 10

HASIL UJI AUTOKORELASI

R-squared	0.819644	Mean dependent var	28734416
Adjusted R-squared	0.806284	S.D. dependent var	19785780
S.E. of regression	8708352.	Akaike info criterion	34.89210
Sum squared resid	2.05E+15	Schwarz criterion	35.03222
Log likelihood	-520.3815	Hannan-Quinn criter.	34.93693
F-statistic	61.35184	Durbin-Watson stat	0.859414
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 11

HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	966551.3	349652.6	2.764319	0.0102
PD	-0.005804	0.073165	-0.079330	0.9374
RD	0.041743	0.026713	1.562645	0.1298